

SKRIPSI
URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DENGAN
NEGARA BELANDA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI
TINDAK PIDANA KORUPSI



Oleh :

ALDI KUSUMA

2000024092

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

THESIS

**THE URGENCY OF INDONESIA'S EXTRADITION AGREEMENT
WITH THE NETHERLANDS IN ORDER TO ANTICIPATE
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION**



Written by:

ALDI KUSUMA

2000024092

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the
Requirements to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DENGAN
NEGARA BELANDA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive signature.

**Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.
NIPM: 19840223 201208 011 1071854**

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**THE URGENCY OF INDONESIA'S EXTRADITION AGREEMENT
WITH THE NETHERLANDS IN ORDER TO ANTICIPATE
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Wita Setyaningrum", is written over a horizontal line.

Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.

NIPM: 19840223 201208 011 1071854

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal: 12 Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.

Anggota Penguji I : Mufti Khakim, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.



Handwritten signatures in blue ink are present to the right of the exam board members' names. There are three distinct signatures corresponding to the three members listed.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



DG.H. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM 1980607 202309 010 0584069

APPROVAL PAGE

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**

At the Date: July 12th, 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.

Examiner I : Mufti Khakim, S.H., M.H.

Examiner II : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.

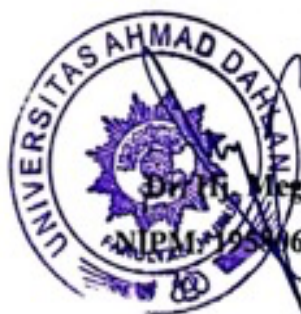


Handwritten signatures in blue ink. The top signature is short and horizontal. The middle signature is large and stylized. The bottom signature is smaller and more compact.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. H. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19540607 202309 010 0584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Kusuma
NIM : 2000024092
Email : aldi2000024092@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
: URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA
Judul Skripsi : DENGAN NEGARA BELANDA DALAM RANGKA
MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 12 Juli 2024


ALDI KUSUMA

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Kusuma
NIM : 2000024092
Email : aldi2000024092@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
: URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA
Judul Skripsi : DENGAN NEGARA BELANDA DALAM RANGKA
MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 12 Juli 2024


ALDI KUSUMA

Mengetahui,
Pembimbing



Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.
NIPM: 195806072023090100584069

HALAMAN MOTTO

“Masa depan cerah menanti bagi mereka yang berani berjuang”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'aalamin, skripsi Penulis yang berjudul “Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Negara Belanda Dalam Rangka Mengantisipasi Tindak Pidana Korupsi” secara khusus Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Penulis, Bapak Bambang Purwadi dan Ibu Sri Handayani, S.E., M.M yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dan tak pernah berhenti mendoakan kepada Penulis.
2. Kakak tercinta Bagus Gigih Andiyani, S.T yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.
3. Calon Istri tercinta Debby Falaila Ramadhani yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada Penulis.
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis sangat berterima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan, bimbingan, dan arahan yang penuh kesabaran diberikan kepada Penulis hingga skripsi ini selesai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'aalamin, puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulis skripsi dengan berjudul “Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Negara Belanda dalam Rangka Mengantisipasi Tindak Pidana Korupsi” ini dapat Penulis selesaikan dengan baik. Selama proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dengan hormat Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan .
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang AIK, Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan tulus mencurahkan ilmu, memberikan motivasi, dan menyampaikan saran-saran berharga, Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang penuh kasih dan dedikasi. Kehadiran dan bimbingan Anda telah menjadi cahaya yang menerangi jalan Penulis menuju hasil terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
6. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
7. Bapak Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
8. Segenap Dosen dan Pengajar Praktikum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu hukum, wawasan, pengalaman, dan motivasi.

Yogyakarta, 28 Juni 2024

Aldi Kusuma

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | vii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES | vii |
| HALAMAN MOTTO..... | ix |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| ABSTRAK..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Jenis Penelitian | 9 |
| 2. Sumber Data | 10 |
| 3. Metode Pendekatan | 12 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 13 |
| 5. Analisis Data | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |

| | |
|--|-----------|
| A. Penelitian Terdahulu..... | 15 |
| B. Kerangka Konseptual | 19 |
| 1. Batasan Istilah | 19 |
| 2. Kerangka Teori..... | 29 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. Urgensi Perjanjian Ekstradisi Negara Indonesia Dengan Negara Belanda Untuk Menangani Pelaku Tindak Pidana Korupsi | 36 |
| B. Implikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Jika Tidak Dilaksanakannya Perjanjian Ekstradisi Antara Negara Indonesia Dengan Negara Belanda | 63 |
| BAB IV PENUTUP | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN..... | 93 |

URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DENGAN NEGARA BELANDA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Korupsi masih menjadi masalah yang luas di Indonesia dan memberikan ancaman besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah Indonesia telah secara aktif melakukan kerja sama internasional untuk memerangi masalah ini. Salah satu aspek krusial dalam kerja sama ini adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda. Ekstradisi sebagai salah satu alat penting dalam pemberantasan korupsi internasional. Sayangnya, tidak adanya perjanjian ekstradisi resmi yang membuat Indonesia sulit mengejar koruptor yang melarikan diri ke Belanda. Akibatnya kesenjangan hukum ini para koruptor kini dapat mencari perlindungan di Belanda, yang berdampak buruk pada reputasi Indonesia di luar negeri dan merugikan pemerintah karena menyita aset-aset yang diperoleh melalui korupsi. Akibatnya, penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan Belanda merupakan langkah penting untuk menutup kesenjangan ini. Bersamaan dengan hal ini, harus ada kolaborasi penegakan hukum yang lebih besar, penambahan personel penegak hukum, dan fokus yang lebih besar pada pencegahan korupsi. Pencegahan sama pentingnya dengan tindakan dalam pemberantasan korupsi. Dalam mengurangi peluang korupsi dan menjaga sumber daya negara, langkah-langkah tegas harus diambil untuk memberantas korupsi. Perjanjian ini tidak hanya meningkatkan kemampuan anti korupsi Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum dan menciptakan struktur pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akibat hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi (korupsi) jika ekstradisi dari Belanda ke Indonesia tidak dilakukan. Menyadari pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda dalam penyelesaian kasus korupsi. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang mana menggunakan metode pendekatan penelitian (*research approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan pentingnya perjanjian ekstradisi Negara Indonesia dengan Negara Belanda yang berfokus untuk menangkap dan membawa pulang pelaku korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke Belanda, terdapat juga perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Belanda yang membuat belum adanya perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Belanda.

Kata Kunci : *Perjanjian; Ekstradisi; Indonesia; Belanda; Korupsi*


**THE URGENCY OF INDONESIA'S EXTRADITION AGREEMENT
WITH THE NETHERLANDS IN ORDER TO ANTICIPATE
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION**

ABSTRACT

Corruption is still a widespread problem in Indonesia and provides a major threat to the country's economic stability and growth. Government Indonesia has actively carried out international cooperation to combat this problem. One of the crucial aspects of this cooperation is the extradition agreement between Indonesia and the Netherlands. Extradition as an important tool in eradicating international corruption. Unfortunately, there is no extradition treaty official which makes it difficult for Indonesia to chase down corruptors who have fled to Dutch. Because of this legal gap, corruptors can now seek protection in the Netherlands, which had a negative impact on Indonesia's reputation abroad and detrimental to the government by confiscating assets obtained through corruption. As a result, signing an extradition treaty with the Netherlands is a step it is important to close this gap. Along with this, there must be greater law enforcement collaboration, additional law enforcement personnel, and a greater focus on preventing corruption. Prevention is equally important with actions to eradicate corruption. To reduce opportunities for corruption and safeguard the country's resources, strict steps must be taken to eradicate corruption. This agreement not only increases anti capabilities Indonesian corruption in upholding the supremacy of law and creating structures government that is accountable and transparent.

The aim of this research is to evaluate the legal ramifications for those who commit crimes of corruption (corruption) if extradition Netherlands and Indonesia is not carried out. Recognize the significance of the extradition agreement between Indonesia and the Netherlands in resolving corruption cases. This research method is included in this type of normative research uses a research approach method (research approach). The results of this research conclude the importance of agreements extradition of the State of Indonesia to the Netherlands which focuses on arrest and bringing home the perpetrators of corruption who fled from Indonesia to the Netherlands, there are also differences between the Indonesian and Dutch legal which make there is no extradition agreement between Indonesia and the Netherlands.

Keywords : *Agreement; Extradition; Indonesia; Dutch; Corruption*

| | |
|---|------------------------------|
| Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center  | On: 22/07/2024 |
|---|------------------------------|